

Judul : DPR minta kebakaran Bromo ditangani, usut penyebabnya
Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ekosistem & Wisata Bisa Terganggu

DPR Minta Kebakaran Bromo Ditangani, Usut Penyebabnya

Senayan menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim). Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas sumber dan penyebab peristiwa tersebut.

ANGGOTA Komisi IV DPR Rajiv khawatir kebakaran di TNBTS meluas sehingga mengancam ekosistem kawasan konservasi dan berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata dan kehidupan masyarakat Bromo. Pasalnya, selain tujuan wisata, TNBTS juga merupakan kawasan konservasi yang kaya dengan pohon-pohon besar berusia ratusan tahun.

Menurut Rajiv, keberhasilan memadamkan api nantinya tidak boleh menjadi akhir dari penanganan kasus. "Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta mengusut secara menyeluruh sumber dan penyebab kebakaran tersebut. Karena, kebakaran terus berulang dengan berbagai penyebab," tegas-

nya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Sebelumnya, kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo bermula sejak Senin (3/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga Minggu (9/8/2026), kebakaran terus meluas hingga menghanguskan 176 hektare kawasan TNBTS. Akibat kejadian tersebut, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup sebagian kawasan wisata sejak Sabtu (8/8/2026) hingga waktu yang belum ditentukan.

Upaya pemadaman dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan petugas gabungan dengan menggunakan satu unit truk pemadam kebakaran, satu unit *drone*

water spray serta helikopter *water bombing*. Kemenhut mencatat, luas areal kebakaran periode Januari-Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, atau melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Rajiv melanjutkan, pemadaman menjadi prioritas saat ini. Tapi setelah kondisi terkendali mesti ada investigasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dari mana titik awal munculnya api, aktivitas di sekitar lokasi, kondisi cuaca, dan berbagai kemungkinan penyebab lainnya diperiksa berdasarkan bukti.

Rajiv menegaskan, penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, kelalaian, kesengajaan, atau faktor alam. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran atau kelalaian manusia, pihak yang bertanggung jawab mesti diproses dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.

"Tidak boleh ada pembiaran

apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian. Apalagi, kawasan TNBTS merupakan aset ekologis dan pariwisata nasional. Setiap tindakan yang merusaknya mesti dipertanggungjawabkan," tegas politisi Nasdem ini.

Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah menambahkan, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem direspons melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang proaktif. Bukan sekadar bertindak reaktif saat api membesar. Karena itu, Pemerintah diminta bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain.

Kemenhut (Kemenhut), lanjut Hindun, perlu mengoptimalkan seluruh instrumen pencegahan. Mulai dari memperkuat patroli terpadu, pemantauan titik panas (*hotspot*) secara intensif, menyiapkan peralatan pemadaman modern, hingga mengencangkan edukasi mitigasi kepada masyarakat di

sekitar kawasan hutan. "Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan menjadi fokus utama," tegas politisi PKB ini.

Selain itu, Hindun mendorong penguatan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan lokal. Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan efektif.

"Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan," kata legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan, dugaan awal penyebab karhutla di kawasan TNBTS yang menghanguskan lahan seluas 176 hektare diduga dipicu oleh aktivitas manusia, dan bukan faktor alam. ■ TIF